ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Oleh:
Nada Soraya
2263201022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi berbasis masyarakat di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2013), yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya abrasi pantai yang mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir, mengancam permukiman dan mata pencaharian masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penanggulangan abrasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas pemerintah desa, Kelompok Perempuan Sungai Lemau, dan masyarakat yang terdampak abrasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana abrasi berbasis masyarakat di Desa Pondok Kelapa telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari efektivitas program yang belum sepenuhnya mampu mengurangi dampak abrasi, keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan, belum meratanya manfaat program bagi masyarakat, serta masih perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung penanggulangan abrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan program penanggulangan abrasi yang lebih tepat sasaran agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, penanggulangan bencana, abrasi pantai, masyarakat, William N. Dunn.

ABSTRACT

THE EVALUATION OF DISASTER MANAGEMENT POLICY IN PONDOK KELAPA VILLAGE, CENTRAL BENGKULU REGENCY

By:
Nada Soraya
2263201022

This study aims to analyze the evaluation of community-based coastal abrasion disaster management policy in Pondok Kelapa Village, Central Bengkulu Regency, based on William N. Dunn's (2013) policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study is initiated by the continued occurrence of coastal abrasion, which has caused damage to coastal areas, threatened settlements and community livelihoods, and indicated that the implementation of abrasion management policies involving the government and the community has not yet been optimal.

This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants consisting of the village government, the Sungai Lemau Women's Group, and communities affected by coastal abrasion. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, while data validity was assessed through source, technique, and time triangulation.

The results show that the implementation of the community-based coastal abrasion disaster management policy in Pondok Kelapa Village has been carried out, but has not yet been optimal. This is reflected in the effectiveness of the program, which has not fully succeeded in reducing the impacts of coastal abrasion, limited resources and budget in policy implementation, unequal distribution of program benefits among the community, and the need to improve coordination between the government and the community in supporting abrasion management. Therefore, strengthening coordination among relevant agencies, increasing community participation in mitigation activities, optimizing the use of resources, and developing more targeted coastal abrasion management programs are necessary to ensure that policy implementation becomes more effective and sustainable.

Keywords: Policy Evaluation, Disaster Management, Coastal Abrasion, Community, William N. Dunn

BAHASA UMB PUSAT BAHASA UMB PUSAT BAHASA UMB PUSAT BAHASA UMB PUSAT BAHASA UMB

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebagian besar wilayah Indonesia, yakni sekitar 70%, berupa lautan yang meliputi perairan nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, Indonesia terletak di posisi geografis yang strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudera besar, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak strategis ini menjadikan Indonesia sebagai jalur penting dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran internasional. Bahkan, diperkirakan sekitar 40% perdagangan dunia melintasi wilayah perairan Indonesia, sehingga posisi Indonesia dalam perdagangan global memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sebagai negara maritim. (Utomo et al., 2025)

Perubahan morfologi pantai merupakan isu penting karena sifatnya yang dinamis dan dipengaruhi interaksi proses oseanografi, atmosfer, geologi, serta aktivitas manusia. Perubahan ini meliputi erosi, akresi, pergeseran garis pantai, dan transformasi bentang alam dalam berbagai skala waktu. Dampaknya signifikan terhadap ekosistem pesisir, sumber daya alam, serta kerentanan infrastruktur dan permukiman. Secara global, perubahan garis pantai semakin cepat akibat kenaikan muka laut, badai tropis, dan variabilitas

iklim, yang diperparah oleh aktivitas manusia seperti reklamasi, pembangunan pelabuhan, dan penambangan pasir. Kondisi ini menjadi perhatian di Indonesia sebagai negara dengan garis pantai panjang dan kepadatan penduduk pesisir tinggi.(Hadi, 2026)

Dalam penelitian Hadi berjudul Analisis perubahan mortofologi pantai ,tahun 2023 , penelitian tersebut membahas Di Jawa Timur, abrasi di Gresik,Lamongan, dan Sidoarjo hanya bersifat lokal, tetapi juga memengaruhi ketahanan nasional melalui kerusakan infrastruktur dan penurunan produktivitas perikanan. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis perubahan morfologi pantai yang akurat dan adaptif untuk mendukung pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.(Hadi, 2026)

Abrasi yang masih terus terjadi meskipun telah dilakukan pembangunan batu penahan ombak menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum memberikan hasil yang optimal terhadap perlindungan wilayah pantai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dan hasil yang dicapai, sehingga dampak kebijakan terhadap pengurangan abrasi masih belum signifikan. Selain itu, lemahnya evaluasi serta pemeliharaan infrastruktur mitigasi turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. disisi lain, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan abrasi masih belum berjalan maksimal. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini mencerminkan

kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.(sri indarti, 2021)

Wilayah pesisir Provinsi Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki karakteristik gelombang kuat dan dinamika alam yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap abrasi pantai. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2022 menunjukkan bahwa intensitas abrasi di wilayah ini terus meningkat setiap tahun, dengan laju pengikisan mencapai 3–5 meter per tahun. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya di Pantai Pondok Kelapa, abrasi telah berlangsung sejak sekitar tahun 2000 dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu berdasarkan hasil observasi lapangan. Proses abrasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya gelombang laut yang mencapai 2–4 meter, kuatnya angin monsun barat, perubahan iklim global, serta aktivitas manusia seperti penambangan pasir laut yang tidak ramah lingkungan.(Bengkulu, 2024)

Dampak abrasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada perubahan garis pantai, tetapi juga telah mengakibatkan kerusakan yang nyata terhadap permukiman dan lahan produktif masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh Dari Desa Pondok Kelapa tahun 2025 dari bapak (alamsyah) kepala desa pondok kelapa, tercatat lebih dari 20 rumah warga telah terdampak abrasi dan sekitar 1 hektar lahan masyarakat hilang akibat pengikisan pantai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, infrastruktur publik seperti jalan desa sepanjang 500 meter, serta fasilitas umum lainnya juga terancam kerusakan, rumah, lahan, dan hotel menghilang jadi lautan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa abrasi di Pantai Pondok Kelapa bukan lagi ancaman potensial, melainkan telah menjadi bencana nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.(Firmansyah & Susanti, 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penanggulangan bencana, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah, Pemerintah Desa Pondok Kelapa memiliki dasar kewenangan melalui Peraturan Desa Pondok Kelapa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, di Desa Pondok Kelapa telah membentuk Kelompok Perempuan Sungai Lemau yang berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman abrasi pantai. Kelompok ini berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan upaya mitigasi dan edukasi bencana berbasis komunitas. Dalam perkembangannya, Kelompok Perempuan Sungai Lemau tidak hanya berperan dalam penanggulangan bencana, tetapi juga aktif dalam pelestarian lingkungan pesisir sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko abrasi.

Keberadaan Kelompok Perempuan Sungai Lemau mencerminkan dinamika implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat grassroot. Kelompok ini menjadi bentuk adaptasi lokal dalam merespons kebutuhan mitigasi bencana dengan melibatkan perempuan sebagai aktor utama dalam kegiatan edukasi, kesiapsiagaan, dan perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas program yang dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi penguatan kelembagaan lokal, serta kontribusi kelompok berbasis komunitas dalam mewujudkan penanggulangan bencana abrasi yang lebih berkelanjutan.

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan abrasi berbasis masyarakat di Pantai Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah masih relatif terbatas, khususnya kajian yang secara komprehensif menganalisis efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Padahal, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu menjawab permasalahan abrasi yang dihadapi masyarakat, serta untuk memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut, dengan menitikberatkan pada efektivitas implementasi program, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

Evaluasi ini menjadi penting untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, mengidentifikasi kendala dan kelemahan

dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif bagi upaya penanggulangan bencana abrasi di masa mendatang. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi berbasis masyarakat di Pantai Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi berbasis masyarakat di Pantai Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis evaluasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi berbasis masyarakat di Pantai Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian evaluasi kebijakan publik dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana abrasi serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik.

2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan

masukan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan penanggulangan bencana abrasi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Bagi pemerintah desa dan masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam upaya penanggulangan bencana abrasi berbasis masyarakat